



tesis Mohammad Sokheh_cek plagiasi

ID : f473068104e502217362578d5d1bb885ac538051



7%

Suspicious texts

File name : tesis Mohammad Sokheh_cek plagiasi.txt

Original file size : 373.16 KB

Number of words : 2,805

Number of characters : 21834

Submitter : UMSIDA Perpustakaan

Submission date : June 12, 2026

Upload type : interface

analysis end date : June 12, 2026

Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :



Similarities

6%

Passages with similarities to sources found in different collections.



AI detection

0%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.

This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



Unrecognized languages

1%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :



Texts between quotes

0%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.



Similarities

6%

Passages with similarities to sources found in different collections.



Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations
1	Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan... dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.13152 ↗	2%	
2	Development of the Integrity Zone of the Ministry of Religious Affairs Offic... doi.org/10.61860/amuya.v1i2.27 ↗	2%	
3	Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi d... doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286 ↗	2%	
8	inspektorat.magetan.go.id inspektorat.magetan.go.id/wp-content/uploads/2022/02/Pedoman-Evaluasi-AKIP-P... ↗	<1%	
9	rsmargono.go.id rsmargono.go.id/ppid/informasipublik/downloadfile/pedoman-pengorganisasian-r... ↗	<1%	

Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
4	kinerja.ekon.go.id kinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/narasi_kinerja_tw3-1806-2024-kxPly.pdf ↗	1%	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukot... ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JAPD/article/download/2033/1489 ↗	1%	
6	STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU... repository.stialan.ac.id/id/eprint/37/1/002%20TMSDA%202023%20-%20Farel%20Ri... ↗	<1%	
7	ijespgjournal.org ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/download/253/232 ↗	<1%	
10	s.mkri.id s.mkri.id/microsite/documents/lkewbk_1747814612_3f5271011561d8ed0adf.pdf ↗	<1%	
11	IMPLEMENTASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAA... doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1878 ↗	<1%	
12	peraturan.go.id peraturan.go.id/files/permenpanrb-no-19-tahun-2023.pdf ↗	<1%	

No.		Description	Similarities	Locations
13		www.menpan.go.id www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-birokrasi-berorientasi-outcomes 	<1%	
14		dispakati.bkn.go.id dispakati.bkn.go.id/assets/download/new/permenpan_1_2023.pdf 	<1%	
15		Strategi Humas dalam Muwujudkan Transparansi Publik Menuju Madrasa... doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8401 	<1%	

Strategi Pengelolaan SDM Dalam Upaya Implementasi
Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi
Mohammad Sokheh
Program Studi Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
sokhehmohammad@gmail.com,

I. Pendahuluan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dijelaskan bahwa Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola Pemerintah Indonesia. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.[12]

Reformasi Birokrasi dapat dimulai pada perubahan-perubahan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), ketatalaksanaan, dengan melakukan perbaikan proses kerja dan prosedur agar lebih efektif efisien, termasuk pemanfaatan teknologi, pola pikir (mindset) dan perilaku pegawai melalui pembiasaan pola pikir aparatur yang melayani, proaktif, dan berintegritas.

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Sidoarjo. Obyek PEKPPP terdapat pada enam aspek yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi yang kemudian disebut sebagai Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 1.1 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Candi

NO TAHUN NILAI KATEGORI SUMBER (Surat SEKDA)

1 2022 3,46 B- (Baik dengan catatan) No: 067/18125/438.1.3.1/2022, tgl 27 Des 2022 [14]

2 2023 3,78 B (Baik) No:000.8/1033/438.1.3.1/2024, tgl 19 Jan 2024 [15]

3 2024 4,135 (Sangat baik) No:000.8.3.4/996/438.1.3.1/2025, tgl 24 Jan 2025 [16]

Dari Tabel 1.1 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Candi di atas, hasil penilaian PEKPPP Kecamatan Candi menunjukkan bahwa terdapat tren positif atau kenaikan dari B- (Baik dengan catatan) hingga meraih nilai A- (Sangat baik). Hal ini menjadi motivasi untuk meraih indeks pelayanan Publik dengan kategori A atau Pelayanan Prima untuk Tahun Berikutnya.

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 Kecamatan Candi

Komponen Yang Dinilai Nilai

Bobot 2023 2024

1 Perencanaan Kinerja 30 26,38 24,02

2 Pengukuran kinerja 30 22,71 24,88

3 Pelaporan Kinerja 15 12,43 12,36

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 16,63 17,63

Nilai Hasil Evaliasi 100 78,15 78,88

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Berdasarkan Surat Bupati Sidoarjo Nomor:700/1996/438.4/2025, tanggal 14 Februari 2025, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Candi [13] seperti tercantum pada Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 Kecamatan Candi di atas. menunjukkan adanya selisih nilai yang kecil antara hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 dan tahun 2024 dengan predikat tetap yakni BB (Sangat Baik).

Dari Tabel 1.2. tersebut juga nampak adanya penurunan nilai pada perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. Hal ini mendorong agar segera dilakukan evaluasi internal untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi.

Dikutip dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.[17]

Teori Jack Bologne /Teori GONE [20] menjelaskan bahwa penyebab korupsi antara lain

Greed (Keserakahan) merupakan sifat alami manusia yang berkaitan dengan karakter pelaku korupsi. Oleh karena itu, untuk mencegahnya perlu dibatasi oleh regulasi.

Opportunity (Kesempatan). Tindakan korupsi terjadi karena ada kesempatan pada suatu Lembaga, organisasi, maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu regulasi untuk menutup peluang pelaku untuk melakukan korupsi.

Needs (Kebutuhan), Alasan pemenuhan kebutuhan merupakan pendorong utama seseorang melakukan korupsi, hal ini terkait dengan ketidakmampuan mengendalikan diri atas keinginan.

Expose (Pengungkapan). Tindakan korupsi meskipun telah terjadi jika tidak terungkap maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, oleh karena itu dikatakan korupsi jika kejadian tersebut mengalami Pengungkapan.

GONE => GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE = CORRUPTION

Dalam upaya mencapai WBK dan WBBM, maka Instansi pemerintah harus mengimplementasikan perubahan pada enam area berikut: manajemen perubahan (perubahan pola pikir dan budaya kerja), penataan Tata Laksana (Perbaikan sistem dan prosedur kerja/SOP), penataan Manajemen SDM (peningkatan kualitas sumber daya manusia/SDM), penguatan Akuntabilitas Kinerja (peningkatan pertanggungjawaban kinerja/Penilaian Kinerja), penguatan Pengawasan (Pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan), serta peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (peningkatan mutu layanan kepada masyarakat). [20][21]

Dalam penelitian ini, yang menjadi daya tarik adalah adanya kombinasi antara Bottom Up yakni dorongan peneliti kepada pimpinan baru Lembaga obyek penelitian (Camat Candi) dan Top Down yakni komitmen pimpinan baru (Camat Candi) dalam upaya implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dengan menggunakan modal komitmen dalam penilaian PEKPPP Kecamatan Candi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hasil Penilaian PEKPPP bisa digunakan sebagai motivasi awal untuk menuju Zona Integritas, karena komponen penilaiannya hampir sama sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3. Perbandingan Komponen Penilaian PEKPPP dan ZONA INTEGRITAS

NO PENILAIAN

6 Aspek PEKPPP PERMENPANRB No.29 Tahun 2022 [19] 6 Area Perubahan ZONA INTEGRITAS PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 [18]

1 Kebijakan Pelayanan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

2 Profesionalisme SDM Penataan Manajemen SDM

3 Sarana Prasarana Penataan Tata Laksana

4 Sistem Informasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5 Konsultasi dan Pengaduan Penguatan Pengawasan

6 Inovasi Manajemen Perubahan

Dari Tabel 1.3. Perbandingan Komponen Penilaian 6 Aspek PEKPPP yang tertuang dalam PERMENPANRB No.29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik [19] dan 6 Area Perubahan Zona Integritas yang tertuang dalam PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah [18] di atas terdapat banyak kesamaan sehingga hasil Penilaian PEKPPP menjadi modal kuat untuk pencapaian Zona Integritas Pemerintah Kecamatan Candi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pada bulan April tahun 2023, Pemerintah Kecamatan Candi telah melakukan Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Organisasi Pembina Zona Interitas yakni Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri pula oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Candi untuk melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mengimplementasikan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi. Namun hingga tahun 2025, Inspektorat belum melakukan penilaian Zona Integritas di Pemerintah Kecamatan Candi karena Pemerintah Kecamatan Candi belum memenuhi kecukupan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan dan komitmen bersama seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Candi untuk mewujudkan Pemerintah yang ber-Zona Integritas. Bagaimanakah Strategi Pengelolaan SDM Dalam Upaya Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi ?

Dalam upaya melakukan terobosan dan membangun komitmen guna mewujudkan lembaga yang berzona integritas, maka dibutuhkan strategi-strategi tertentu. Angelina Sofya [9] menjelaskan bahwa manajemen perubahan dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan SDM membutuhkan perhatian khusus yang dinamis. Strategi pengelolaan konflik organisasi yang efektif membuat kinerja optimal, hubungan harmonis, serta tercapainya tujuan organisasi.

Strategi manajemen perubahan organisasi antara lain pemahaman tujuan perubahan di lingkungan organisasi, pengelolaan

perubahan secara proaktif, keterlibatan diri dan komunikasi yang baik, serta adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap keadaan lingkungan.

Sedangkan strategi untuk mengelola konflik dalam organisasi antara lain memahami akar masalah konflik, komunikasi yang efektif di internal organisasi, penggunaan Teknik penyelesaian konflik, serta pengembangan keterampilan Manajerial. Komunikasi yang efektif dalam manajemen perubahan di dalam organisasi antara lain sikap transparansi dan keterbukaan dalam tujuan, alasan, langkah-langkah perubahan serta dampak yang bakal terjadi. Konsistensi dalam komunikasi akan menghasilkan komunikasi yang efektif, melibatkan seluruh komponen dalam lingkungan, serta adanya penyesuaian terhadap kebutuhan individu secara fleksibel.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif [3] dengan Teknik Pengumpulan data melalui :

Dokumentasi, yakni pengumpulan dokumen-dokumen primer dan sekunder yang mendukung penelitian, antara lain :

Pengumpulan regulasi terkait PEKPPP dan Zona Integritas

Pengumpulan dokumen artikel/jurnal penelitian sejenis,

Pengumpulan dokumen-dokumen terkait Kecukupan Data PEKPPP dan Zona Integritas,

Observasi langsung di Kantor Kecamatan Candi terkait Pelaksanaan PEKPPP, Zona Integritas dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Candi dalam pelaksanaan PEKPPP dan Zona Integritas, serta

Wawancara kepada stakeholder yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Uji Validitas Dalam penelitian kualitatif konsep validitas eksternal berhubungan dengan kemungkinan perbandingan dengan hasil- hasil studi lain dan untuk dapat dilakukan perbandingan oleh peneliti lain. Dalam Penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis SWOT dengan Teori Jack Bologne (Teori GONE), Hasil analisis SWOT dengan hasil FGD, Hasil literatur review dengan hasil FGD

Key Informan merupakan narasumber kunci yang diharapkan mampu memberi informasi secara tepat guna menghasilkan data akurat sehingga memberikan hasil penelitian yang akurat juga. Key Informan dalam penelitian ini antara lain :

Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sidoarjo selaku Pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Penilaian PEKPPP dalam hal ini diwakilkan kepada staf an. Heru Susanto, ST

Inspektur Kabupaten Sidoarjo selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam penilaian Zona Integritas dalam hal ini diwakilkan kepada staf an. Timur Kartika S,S.kom dan PIC ZI an. Yuanita Hastowo A.Md Camat Candi

Pegawai Pelaksana Layanan di Kecamatan Candi

Pegawai Pelaksana urusan Kepegawaian

Masyarakat Umum pengguna layanan Kecamatan Candi

Metode penentuan sampling pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling (Judgment Sampling) dengan menentukan secara langsung stakeholder terkait yang diwawancarai (sebagai key informan), baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Hasil wawancara ini dilakukan dokumentasi hasil wawancara, dilanjutkan dengan labeling dan reduksi data yang tidak mendukung penelitian

Focus Group Discussion (FGD) merupakan diskusi kelompok terarah yang memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD dilakukan dengan cara mengundang para Key informan untuk konfirmasi hasil wawancara agar diperoleh hasil yang valid dan akurat.

Teknik analisis data menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats) [11], yakni mengukur Kekuatan dan Kelemahan yang berasal dari dalam (internal) maupun Peluang dan Ancaman yang berasal dari luar (eksternal) dalam suatu organisasi. Dari data dokumentasi, hasil observasi, serta hasil wawancara dituangkan dalam Tabel SWOT sehingga terlihat Kekuatan dan Peluang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai tujuan, serta menggunakan data Kelemahan dan Ancaman untuk mencari solusi agar tujuan tetap tercapai.

Tabel 2.1. Analisis SWOT

	Eksternal	Internal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Kekuatan (S)	S+O	S+T		
Kelemahan (W)	W+O	W+T		

Pertemuan antara Kekuatan (Strength) dengan Peluang (Opportunity) akan menghasilkan konsep luar biasa dan ideal yang mampu memberikan motivasi tinggi dan optimisme bagi peneliti untuk mencapai tujuan.

Pertemuan antara Kekuatan (Strength) dengan Ancaman (Threats) akan menghasilkan strategi untuk menghadapi ancaman dengan motivasi yang bersumber dari Kekuatan yang ada.

Pertemuan antara Kelemahan (Weakness) dengan Peluang (Opportunity) akan menghasilkan strategi untuk mereduksi kelemahan karena memiliki optimisme tinggi untuk mencapai tujuan.

Pertemuan antara Kelemahan (Weakness) dengan Ancaman (Threats) akan menghasilkan dorongan kuat untuk menghadapi tantangan luar biasa.

III. Pembahasan

Berbagai langkah strategis dirancang untuk mendorong pencapaian Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi, diantaranya dorongan kekuatan Bottom Up dari pejabat eselon IV (supervisor) kepada pimpinan tertinggi yakni Camat. Selain itu kekuatan Top Down yakni pernyataan pimpinan tertinggi (Camat) terkait komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Zona Integritas serta upaya meraih nilai tinggi dalam penilaian Zona Integritas oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi telah dilakukan.

Berbekal nilai indeks pelayanan publik Pemerintah Kecamatan Candi tahun 2022, 2023, 2024 yang menunjukkan tren naik dari B- hingga A-, kemudian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candi tahun 2023 dan 2024 yakni bernilai BB (Sangat Baik), maka menjadi optimisme bagi peneliti untuk memotivasi pencapaian Zona Integritas Pemerintah kecamatan Candi sebagai Wilayah Bebas Korupsi.

Dari hasil pengkajian rangkaian penilaian Zona Integritas di Pemerintah Kecamatan Candi oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo per MEI 2026 diperoleh Hasil sebagai berikut :

No Area Perubahan Bobot Pemenuhan Reform Nilai % Nilai Min

PENGUNGKIT 80.00 Kategori

1 Manajemen Perubahan 8.00 1.84 0.67 2.51 31.38 Tidak Lulus

2 Penataan Tata Laksana 7.00 1.49 0.50 1.99 28.36 Tidak Lulus

3 Penataan Sistem SDM 10.00 2.46 0.75 3.21 32.09 Tidak Lulus

4 Penguatan Akuntabilitas 10.00 2.05 2.83 4.88 48.80 Tidak Lulus

5 Penguatan Pengawasan 15.00 1.66 1.25 2.91 19.39 Tidak Lulus

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10.00 2.35 2.50 4.85 48.47 Tidak Lulus

Total Pengungkit 20.34 33.99 Tidak Lulus

No HASIL 40.00

1 BIRORASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 22.50

a. Nilai Survey Persepsi Korupsi 17.50 0.00 0.00 Tidak Lulus

b Capaian Kinerja lebih baik dari sebelumnya 5.00 1.25 25.00 Tidak Lulus

II PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 17.50 0.00 0.00

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal Indeks Persepsi kualitas pelayanan Publik 17.50 0.00 0.00 Tidak Lulus

TOTAL HASIL 1.25 3.13

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS

21.59

Tidak Lulus

*) Sumber :

1. Berita Acara Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Pada Kecamatan Candi Tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo [28](sebagaimana terlampir).

2. Buku Panduan Strategis Pembangunan Zona Integritas [29]

Jika dilihat dari tabel hasil penilaian ZI di atas, terlihat jelas bahwa semua area perubahan mendapatkan nilai dengan kategori "Tidak Lulus" dengan penjelasan bahwa pada area perubahan "Manajemen Perubahan" mendapatkan komentar hasil evaluasi sebagai berikut : Belum terdapat penjelasan dan evidence terkait mekanisme / prosedur pemilihan agen perubahan, dalam dokumen rencana kerja ZI tidak diberikan uraian target dan waktu pelaksanaannya serta nota dinas penyusunan rencana kerja yang diupload adalah nota dinas lama sebelum tahun 2025 atau belum melampirkan dokumen terbaru. Capture media Sosial yang dilampirkan masih tahun 2023 sehingga belum menunjukkan implementasi pembangunan ZI tahun berjalan.

Begitu pula 5 area perubahan yang lain, diulas lengkap melalui Berita Acara Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Pada Kecamatan Candi Tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo (sebagaimana terlampir).

Dari ulasan komentar tim penilai ZI Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang dituangkan dalam berita acara penilaian ZI pada setiap area perubahan mendapatkan nilai dengan kategori "Tidak Lulus", maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komitmen Pimpinan tertinggi yakni Camat, sangat dibutuhkan guna melakukan pengawasan, kontroling, memberikan dorongan, motivasi kepada tim ZI Kecamatan Candi untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang menjadi bahan penilaian,. Penerapan Reward and Punishman kepada setiap personil tim penilaian Zona Integritas Kecamatan Candi.

Menindaklanjuti hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kecamatan Candi di atas, maka peneliti melakukan wawancara lanjutan secara mendalam kepada Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakilkan kepada staf Heru Susanto, S.T. Peneliti menanyakan apakah benar Nilai PEKPPP yang bagus, nilai Sakip

yang sangat baik bisa menjadikan optimisme untuk meraih hasil penilaian pembangunan Zona Integritas yang bagus pula? Heru Susanto, S.T. menjawab benar bahwa Nilai PEKPPP yang bagus, nilai Sakip yang sangat baik bisa menjadikan optimisme untuk meraih hasil penilaian pembangunan Zona Integritas yang bagus pula, namun Kunci utamanya adalah komitmen bersama untuk melakukan tahapan pada 6 area perubahan secara konsisten, baik pelaksanaan tahapan maupun kelengkapan administrasi yang harus diserahkan kepada tim penilai. Peran Camat sebagai Top Leader di lingkungan pemerintah Kecamatan Candi menjadi hal mutlak untuk mengawal setiap tahapan, melakukan controlling untuk memastikan bahwa setiap tahapan sudah dilalui dengan maksimal dan dokumen yang harus diserahkan ke tim penilai telah tercukupi. Reward and Punishment menjadi motivasi tersendiri bagi setiap personil / SDM di kecamatan Candi untuk memperkuat komitmen mewujudkan Kecamatan Candi menjadi wilayah Bebas korupsi.

Wawancara lanjutan juga dilakukan kepada Inspektur Pemerintah kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakilkan kepada PIC Penilaian Zona Integritas, yakni Yuanita Hastowo A.Md. Peneliti menanyakan mengapa hasil penilaian pembangunan Zona Integritas Pemerintah kecamatan Candi jauh dari harapan? Yuanita Hastowo A.Md selaku PIC penilaian Zona Integritas menjawab bahwa semua hasil penilaian dan evaluasi telah dituangkan pada Berita Acara Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Pada Kecamatan Candi Tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Yang menjadi perhatian adalah tim ZI pemerintah Kecamatan Candi tidak melengkapi form isian penilaian Zona Integritas dengan baik, ada beberapa permintaan data yang tidak dipenuhi, Sebagian pula data yang diunggah pada link penilaian tidak diupdate berdasarkan tahun berjalan, nelainkan data-data lama yang tidak lagi relevan. Hal ini berdampak pada penilaian terhadap kelengkapan dan kecukupan data, sehingga pemerintah Kecamatan Candi meraih nilai dalam kategori "Tidak Lulus" pada semua area perubahan.

Peneliti juga menelusuri pada tim Zona Integritas Kecamatan Candi untuk menanyakan mengapa banya data permintaan inspektorat untuk penilaian Zona Integritas tidak semua dicukupi oleh tim?

menanggapi hal itu, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Candi Husnia Eta menjawab bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam pemenuhan pengiriman data penilaian ZI, diantaranya adalah tingkat kesibukan sebagai dampak konsentrasi dalam kegiatan PIWK pembangunan/penambalan jalan berlubang se-Kecamatan Candi. selain itu rangkaian Gelaran Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak juga menyita waktu tersendiri sehingga berdampak pada pemenuhan data ZI yang kurang maksimal sehingga capaian nilai ZI Kecamatan Candi "Tidak Lulus" di setiap area perubahan.

kesimpulan

Pada penelitian tentang Strategi Pengelolaan SDM dalam upaya Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi merupakan hal yang menarik dan penuh tantangan. Pemerintah Kecamatan Candi memiliki modal kuat untuk mengimplementasikan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) karena nilai capaian PEKPPP dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. selain itu, perolehan nilai SAKIP dua tahun terakhir juga mendapatkan nilai sangat baik, yang menjadikan peneliti Optimis bahwa Pemerintah Kecamatan Candi mampu meraih predikat sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

Namun kenyataan di lapangan ,emumjukkan hal yang bertolak belakang.